Aisyah Assyifa, S.H.
Email: aisyah@ijrs.or.id
LinkedIn: Aisyah Assyifa

Profil Singkat
Aisyah Assyifa merupakan lulusan program Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang meraih penghargaan sebagai "Wisudawan Berprestasi" pada wisuda angkatan ke-empat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pada masa perkuliahannya, Aisyah juga juga merupakan *awardee* program Indonesian International Mobility Awards (IISMA) ke Michigan State University, Amerika Serikat, pada tahun 2021. Selain sebagai Peneliti di IJRS, Aisyah juga tergabung sebagai anggota di Pokja Akses terhadap Keadilan di Kejaksaan RI sejak tahun 2022 dan Pokja Perempuan dan Anak di Mahkamah Agung.

Ketertarikannya pada isu *Criminal Justice Reform* membuatnya terlibat di beberapa program, antara lain penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika, Kajian Dampak KUHP 2023 terhadap hukum acara pidana di Indonesia, dampak UU TPKS dan pasal-pasal terkait kekerasan seksual dalam KUHP 2023 terhadap peran hakim dan jaksa, serta penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atas KUHP 2023.

Tidak hanya itu, Aisyah juga terlibat dalam berbagai program terkait isu *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dan juga akses terhadap keadilan, khususnya dalam isu perlindungan anak. Aisyah dipercaya untuk menjadi PIC mengelola kegiatan Koalisi 18+ yang bergerak di isu pencegahan perkawinan anak dengan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Aisyah terlibat dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan perempuan dan anak di Kejaksaan dan Mahkamah Agung khususnya pada penanganan perkara kekerasan seksual, perceraian, dan permohonan dispensasi kawin. Berkaitan dengan isu kekerasan seksual, Aisyah terlibat dalam penyusunan kajian terkait peluang implementasi Dana Bantuan Korban dan juga melakukan asistensi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk penguatan kelembagaan dalam DBK. Sejak tahun 2022, Aisyah juga terlibat dalam penyusunan Kajian Pendahuluan terkait usulan penyusunan Rancangan

Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi beserta serangkaian advokasi untuk mendorong adanya undang-undang yang mengatur terkait penghapusan diskriminasi secara lebih komprehensif.

Jabatan Saat Ini
Peneliti

Pendidikan

1. S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (lulus 2022)

Pengalaman Kerja

1. Peneliti di Indonesia Judicial Research Society (2023 - sekarang)
2. Anggota di Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI (2024-sekarang)
3. Anggota di Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan di Kejaksaan RI (2022 - sekarang)
4. Asisten Peneliti di Indonesia Judicial Research Society (2022-2023)
5. Peneliti *Part-time* di PUSKAPA (Agustus - Desember 2022)
6. Peserta Program Belajar Kerja di PUSKAPA (Februari - Mei 2022)

Program IJRS yang Pernah Dijalankan

1. *Project Officer* di Program Penelitian Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Studi di Jakarta dan Yogyakarta), Alternative Law Groups (2022-2023)
2. Peneliti di Program Penyusunan Naskah Akademik RUU Penghapusan Diskriminasi, CRM (2022-2023)
3. Peneliti di aktivitas Kelompok Kerja Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (2022-2023)
4. Peneliti di Program Penyusunan Draft Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Diskresi Penuntutan Penuntut Umum, AIPJ-RJ (2022-2023)
5. Peneliti di Program Penelitian tentang Tinjauan Hukum Implementasi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) di Indonesia, IOM (2022-2023)
6. Peneliti di program Asesmen Dampak RKUHP terhadap KUHAP dan RKUHAP, TAF (2022-2023)
7. Peneliti di program Monitoring dan Evaluasi Implementasi Perma 3/2017 pada perkara pidana dan perdata, Perma 5/2019, AIPJ2 (2023)
8. Peneliti di program Internalisasi UU TPKS, KUHP Baru dan Bangkok Guidance 2022 kepada Pokja Perempuan dan Anak MA RI, AIPJ2 (2023)
9. Peneliti pada kajian Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana, LPSK (2024-2025)
10. *Project Officer* di Program Penelitian Mekanisme Penegakan Hukum untuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi, CRM (2024-2025)
11. Peneliti di penyusunan Pengantar UU TPKS, KUHP Baru, dan Bangkok Guidance 2022 terkait dengan Penanganan Perempuan dan Anak Bagi Mahkamah Agung RI, AIPJ2 (2024).

12. Peneliti di penyusunan kajian Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum dalam RPJMN 2025 – 2029, Bappenas (2024).
13. Peneliti di Sosialisasi KUHP 2023 di Kejati DKI Jakarta & Penyusunan Buku Saku (*Leerboek*) KUHP 2023, (2024)
14. Peneliti di penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pidana dan Tindakan untuk pelaksanaan KUHP 2023 dan penyusunan RUU Penyesuaian Pidana, (2025)
15. Peneliti di penyusunan Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (*Wetboek van Strafvordering*), (2025)

Program IJRS yang Sedang Dijalankan

1. Peneliti di penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Pasal 111 Sampai Dengan Pasal Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, OSF (2022-2023).
2. Peneliti di Program Kajian Dana Bantuan Korban Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, OSF (2023-2026)
3. *Project Officer* di Program Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi, CRM (2025)
4. Peneliti di Program Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum 2024, BPHN (2025)
5. Peneliti di Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) VIII, Ko-Kreasi, dan Advokasi Isu OGP di Indonesia, EU-OGP (2025)

Hasil Publikasi

Buku

1. Assyifa, Aisyah, et.al. Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024.
2. Latuputty, Marselino Heryanto, et. al., Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024.
3. Maharani, Marsha, et. al. Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024.
4. Paulina, Arianda Lastiur, et. al. Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024.
5. Weriansyah, Aditya, et. al. (2023). *Tinjauan Hukum – Implementasi Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia*. Jakarta: IJRS
6. Weriansyah, Aditya, et.al. Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024.
7. Weriansyah, Aditya, et. al., Tinjauan KUHP 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, 2025.

8. Arianto, Gladys Nadya, et. al., Kajian Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum: Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, 2025.
9. Warneri, Muhammad Rizaldi, et. al., Pengantar UU TPKS, KUHP Baru, dan Bangkok Guidance 2022 terkait dengan Penanganan Perempuan dan Anak Bagi Mahkamah Agung RI, 2024.
10. Latuputty, Marselino Heryanto, et. al., Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum dalam RPJMN 2025 – 2029, 2024.

Artikel Jurnal

1. *Assyifa, Aisyah, et. al.* (2021) Urgensi Regulasi Khusus tentang Perusahaan Rintisan (Startup) dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Perusahaan Rintisan di Indonesia. Jurnal Jentera Vol. 4 (1). Hlm. 458-478
2. Atma Jaya Catholic University of Indonesia Publishers. 2024. "The Urgency of Restructuring the Criminal Provisions of the Narcotics Law Number 35 Year 2009." Atma Jaya Catholic University of Indonesia Publishers, November 1.

Tulisan di Media

1. *Assyifa, Aisyah, et. al.,* (2023). Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif – pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku. The Conversation. https://theconversation.com/kasus-mario-dandy-salah-kaprah-penerapan-keadilan-restoratif-pemulihan-korban-tidak-boleh-menghentikan-proses-pidana-pelaku-202614

Pencapaian

1. Mendapatkan penghargaan “Wisudawan Berprestasi” pada wisuda angkatan ke-empat Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tahun 2022